

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum*, CV. Diadit Media, Jakarta.
- Ali, Mahrus dan dan Deni Setya Bagus Yuherman, 2020, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung.
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Asi Mahastya, Jakarta.
- Bemmelen, Van, 1984, *Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Jakarta.
- Chaerudin, Syaiful A.D. dan Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adhami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang.
-, 2016, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Eko, Sutoro, dkk, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1982, *Hukum Agraria Indonesia (Cetakan II)*, Jambatan, Jakarta.
- Hartono, Sunaryanti, 2014, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Isnanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Kartanegara, Satochid, 2001, *Hukum Pidana Bagian II*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Kartika, Pandu Pramoe, dkk, 2020, *Korupsi Desa*, Ruas Media, Yogyakarta.

Kartohadikusuma, Sutardjo, 1984, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta.

Klitgaard, Robert, 2001, *Membasmi Korupsi (Edisi Terjemahan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kristiana, Yudi, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

KPK, 2006, *Memahami untuk Membasmi : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

....., 2016, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Lamintang, P.A.F., 1984, *Delik-Delik Khusus dalam Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung.

....., 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung.

Lubis, Mochtar dan James C. Scott, 1985, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES Indonesia, Jakarta.

....., 1990, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia secara Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.

Nurcholis, Hanif, 2012, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.

Palupi, Sri, dkk, 2016, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa berbasis Hak*, Lakpesdam PBNU, Jakarta.

Silahunudin, M., 2015, *Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kemendes PDTT RI, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

....., 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

....., 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sudirwo, Daeng, 1991, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung.

Suhartono, 2000, *Politik Lokal*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, Jakarta.

Sukriono, Didik, 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Malang.

Surianingrat, Bayu, 1979, *Desa dan Kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutaryono, dkk, 2014, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta.

Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta.

....., 1984, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta

Tanzi, Vito, 1994, *Corruption, Government Activities and Markets*, IMF Working Paper, Washington DC.

Wasistiono, Sadu, 2001, *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*, Alqa Print, Bandung.

Wasistiono, Sadu, dkk, 2014, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Universitas Terbuka Press, Tangerang.

Widjaya, H.A.W., 2001, *Pemerintahan Desa/Marga berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Suatu Telaah Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wiyono, R., 2005, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 yang telah dicetak ulang).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan
Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April
1958 no.Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.AMb.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.AMb.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Bjm.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.Sus-
TPK/2012/PN.Mks.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 1/Pid.Sus-
TPK/2022/PN.Plk.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 90/Pid.Sus-
TPK/2019/PN.Smg.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Smg.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

C. Jurnal, Tesis, Penulisan Hukum

Adrian, Arifin, 2013, “Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika, Pengalaman, dan Keahlian Audit Terhadap Ketetapan Pemberian Opini Oleh Auditor (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau)”, *Jurnal*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.

Alamsyah, M. Nur, 2011, “Memahami Perkembangan Desa di Indonesia”, *Jurnal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako, Palu.

Ardiansyah, Irfan, 2018, “Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Permufakatan Jahat oleh Koruptor (Studi Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016)”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.

Badjuri, Achmad, 2011, “Penaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia”, *Jurnal*, Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank, Semarang.

Baswir, Revrison, 2002, “Dinamika Korupsi di Indonesia : dalam Perspektif Struktural”, *Jurnal*, Penerbit Cahaya, Jakarta.

Dewi, Putu Eka D.M., dkk, 2017, “Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 2 No. 2, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, Denpasar.

Harfi, M. Zaini, 2016, “Politik Hukum Pembentukan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.

Herdiana, Dian, 2019, “Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa”, *Jurnal Mantra Pembaruan*, Vol. 3 No. 1, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

I Nyoman Pranata Sena, 2016, “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Desa secara Serentak Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kulon Progo”, *Penulisan Hukum*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Leiken, Robert S., 1996, “Controlling the Global Corruption Epidemic”, *Jurnal*, Transaction Publisher, London.

- Lienarto, Lhedrik, 2016, “Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* dalam Tindak Pidana di Indonesia”, *Jurnal*, Portal Garuda, Jakarta.
- Mahdeli, Iis, 2015, ““Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nye, J.S, 1967, “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis”, *Jurnal*, American Political Science Association, Washington DC.
- Philip, Mark, 1977, “Defining Political Corruption”, *Jurnal*, Blackwell Publisher, Oxford.
- Rahmat Islami, 2016, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No. 99/Pid.Sus/2013/PT. Mks.)”, *Penulisan Hukum*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rahman, Fathur, 2011, “Korupsi di Tingkat Desa”, *Jurnal Governance*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya, Malang.
- Sahrir, 2017, “Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan PN Makassar No. 05/Pid/2011/PT. Mks.)”, *Penulisan Hukum*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sumarni, 2018, “Kompetensi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa di Tiga Desa Kecamatan Nglihar Gunungkidul”, *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi, 2021, “Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia”, *Jurnal Dharmasiswa*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

D. Internet

- Adji, Bayu, 2019, “Kepala Desa di Tasikmalaya Jadi Tersangka Korupsi”, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/ptpii349/kepala-desadi-tasikmalaya-jadi-tersangka-korupsi>, diakses pada tanggal 7 November 2019.
- Ani, 2019, “ICW: Sektor Anggaran Desa Jadi yang Paling Korup di 2018”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190207192744-12-367308/icw-sektor-anggaran-desajadi-yang-paling-korup-di-2018?>, diakses pada tanggal 7 November 2019.

- Antara, 2020, "BNPP: 473 Kades telah Terseret Korupsi Dana Desa", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/292266/bnnp-473-kades-telah-terseret-korupsi-dana-desa>, diakses pada 27 Januari 2021.
- Ayyubi, Saladin, 2018, "Terlibat Korupsi, 2 Kadesa dan 3 Aparat Desa ditahan Kejaksaan", <https://daerah.sindonews.com/berita/1289427/22/terlibat-korupsi-2-kades-dan-3-aparat-desa-ditahan-kejaksaan>, diakses pada 27 Januari 2021.
- BPKP, 2015, "Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa", <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabbimkonkeudesapdf>, diakses pada tanggal 4 Januari 2021.
- BPS, 2020, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik menjadi 9,78%", <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, diakses pada tanggal 7 Januari 2021.
- Budianto, Eko, 2019, "Korupsi Dana Desa Rp 287 Juta, Kades di Jombang dijebloskan ke Penjara", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4710172/korupsi-dana-desa-rp-287-juta-kades-di-jombang-dijebloskan-ke-penjara>, diakses pada tanggal 10 November 2019.
- Hendra, 2017, "Budiman Sudjarmiko, Berenang Menuju Pulau Impian", www.mediaobsesi.com/berita-505-budiman-sudjarmiko-berenang-menuju-pulau-impian.html, diakses pada tanggal 29 Desember 2020.
- Ikhsanudin, Arief, 2019, "ICW: 158 Perangkat Desa Terkena Kasus Korupsi", <https://news.detik.com/berita/d-4528256/icw-158-perangkat-desa-terkena-kasus-korupsi>, diakses pada tanggal 7 November 2019.
- Kemendesa RI, 2020, "Penyaluran Dana Desa Tahun 2015 – 2020", <http://www.sipede.ppmd.kemendesa.go.id>, diakses 18 Juli 2021.
- 2021, "Status IDM", <http://www.idm.kemendesa.go.id>, diakses 18 Juli 2021.
- Kemenkeu RI, 2017, "Buku Saku Dana Desa", <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>, diakses tanggal 18 Juli 2021.
-, 2021, "Kebijakan Dana Desa 2021", <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp->

content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf,
diakses tanggal 18 Juli 2021.

KEMENKO PMK, 2020, “Dana Desa Fokus pada Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa”, <https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa>, diakses pada 7 Januari 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, “Perbuatan Curang”, <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/perbuatan-curang>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

Setiabudi, Eko, 2019, “IPD dan Kemiskinan Pedesaan”, <https://geotimes.co.id/opini/ipd-dan-kemiskinan-pedesaan>, diakses pada tanggal 7 November 2019.

Siregar, Raja Adil, 2019, “Kades Tersangka Korupsi Dana Desa, Mendes: Kesalahan Administrasi Saja”, <https://news.detik.com/berita/d-4447020/kades-tersangka-korupsi-dana-desa-mendes-kesalahan-administratif-saja>, diakses pada tanggal 7 November 2019.

Sumanto, Sukarno W., 2020, “Akuntabilitas Dana Desa”, <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/akuntabilitas-dana-desa>, diakses 18 Juli 2021.

Sutopo, Danny, 2018, “Bianglala Pembangunan Desa”, <https://geotimes.co.id/opini/bianglala-pembangunan-desa/>, diakses pada tanggal 7 November 2019.

Wira, Adianto, 2019, “Mantan Kades Sewakan Tanah ‘Bengkok’, Uangnya diduga dikorupsi Senilai Ratusan Juta Rupiah”, <https://jabar.pojoksatu.id/purwakarta/2019/09/08/mantan-kades-sewakan-tanah-bengkok-uangnya-diduga-dikorupsi-senilai-ratusan-juta-rupiah/>, diakses pada tanggal 12 November 2019.